

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dampak reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan sentralisasi di pemerintah pusat menjadi sistem pemerintahan desentralisasi di pemerintah daerah. Perubahan pada sistem pemerintahan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, dan yang terbaru yaitu UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Kewenangan pemerintah daerah yang besar memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa elemen salah satunya yaitu akuntabilitas. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk dilakukan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik semakin meningkatkan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia (Halim & Kusufi, 2014). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pengguna laporan keuangan (Sande, 2013).

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk terwujudnya *good governance*. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dapat berupa penyajian laporan keuangan yang merupakan salah satu bentuk yang penting dalam akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2016). Dengan adanya penyajian laporan keuangan maka dapat

meningkatkan kepercayaan publik terkait dengan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan basis akrual. Setiap akhir tahun periode anggaran pemerintah diwajibkan untuk menyajikan komponen-komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut dibuat oleh pengelola keuangan (entitas pelaporan).

Kenyataannya, Pemerintah di Indonesia belum mampu menyajikan laporan keuangan dengan optimal. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan 15.773 permasalahan senilai Rp 11,55 triliun dalam pemeriksaan selama semester I-2018. Permasalahan ini meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 10,06 triliun, serta permasalahan ketidakhematan, dan ketidakefektifan senilai Rp 1,49 triliun (<http://www.bpk.go.id/news>).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangannya saja, melainkan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Hal ini selaras dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses laporan keuangan untuk mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan sebagai bahan evaluasi dalam mengelola keuangan publik. Semakin mudah masyarakat untuk mengakses laporan keuangan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

terkait pengelolaan keuangan daerah yang dapat berwujud peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Selain penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, faktor lain dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi keuangan. Sumber daya manusia adalah pengelola dan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu dibutuhkan unit pengelola keuangan yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan adanya aparatur pemerintah yang kompeten maka penyampaian laporan keuangan akan menjadi baik pula sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kurnia, 2013). Hal yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar, sehingga terhambatnya perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya (Insani, 2009).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu entitas yang wajib menyajikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Opini yang diberikan oleh BPK</b>
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh opini WTP selama 5 tahun berturut-turut pada tahun 2014-2018, artinya Pemerintah Provinsi Sumsel telah memperbaiki dan menindaklanjuti kelemahan yang ditemukan sehingga penyajian laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Hal ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurut BPK, pemprov Sumsel harus dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara lebih transparan dan akuntabel serta taat pada peraturan perundang-undangan. (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/556685/>). Mengacu pada penelitian Hehanussa (2015) mengatakan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti, semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun penyajian laporan keuangannya telah disusun dan disajikan secara wajar, namun masyarakat masih mengalami permasalahan terkait sulitnya mengakses informasi laporan keuangan.

Terkait dengan permasalahan dalam mengakses informasi publik, pengguna informasi masih kesulitan untuk mengetahui informasi laporan keuangan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum mempublikasikannya. Pemerintah belum optimal dalam memberikan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi publik dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih dikualifikasikan menuju informatif. Hal ini diketahui dari Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018. Masyarakat menginginkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengetahui pengelolaan sumber daya yang telah dikelola Pemerintah.

Selain masalah penyajian laporan keuangan yang belum optimal dan masih susah masyarakat untuk mengakses informasi laporan keuangan, Masalah lainnya yang sering terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban

bagi aparat pemerintah belum sesuai yang diharapkan masyarakat (Ludani, Tampi, & Pombengi, 2015). Aparatur pemerintah daerah pada Provinsi Sumsel masih belum memiliki kompetensi yang memadai terkait dengan bidang akuntansi hal ini dikarenakan masih banyak terdapat aparatur instansi pemerintah baik provinsi atau kabupaten/kota tidak sepenuhnya didasari dengan kompetensi yang dimiliki (<https://palembang.tribunnews.com/2017/06/28/>). Hal ini selaras dengan penelitian Pujanira (2016) bahwa ditemukan kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas pokok dengan kompetensi yang dimiliki pegawai. Harus diakui masih ada permasalahan yang terjadi dimana staf pengelola dan penyusunan laporan keuangan (pengelolaan keuangan) kurang memiliki keterampilan di bidang akuntansi. Sehingga dengan adanya aparatur pemerintah daerah yang belum memiliki kompetensi yang memadai, dapat menghambat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini selaras dengan pendapat dari Gubernur Sumatera Selatan yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparansi dan akuntabilitas perlu didukung dengan peningkatan aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas profesional dan responsif (<http://palembang.tribunnews.com>) diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Semakin tinggi persepsi pengguna laporan keuangan mengenai kelayakan penyajian laporan keuangan dan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dilakukan pemerintah daerah, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mustafa, 2012). Pada penelitian Sande (2013) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian dari Sutrisna (2016) dan Somad (2018) yang menyebutkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap**

## **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan”.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada poin tiga maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi aparatur pemda terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumsel. Hal ini dikarenakan BPKAD merupakan entitas pelaporan dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juni 2019 meliputi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik daerah (BMD).

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan , aksesibilitas laporan keuangan, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah wawasan penulis mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumsel.
2. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mempertanggungjawabkan dana publik yang telah dipercayakan kepadanya untuk dikelola dengan baik.
3. Dapat memberikan masukan kepada penulis lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi tugas akhir/skripsi secara singkat dan jelas, sehingga terdapat

gambaran hubungan antara masing-masing bab. Bab tersebut menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi dasar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, serta tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan analisis dan pembahasan masalah yang ada yaitu mengenai teori agensi, teori signal, pengertian dan komponen dari penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, kompetensi aparatur pemerintah daerah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

**BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB V           KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi pemaparan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pemecahan masalah pada penelitian ini.